



## Demokrasi Ekonomi Pancasila, Ekonomi Berdikari dalam Menghadapi Arus Globalisasi-Revolusi Industri 4.0

Timbul Hamonangan Simanjuntak<sup>1</sup>, Imam Mukhlis<sup>2</sup>, Andik Pratama<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Ketua Divisi Litbang Yayasan Bung Karno, Jakarta

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang

<sup>3</sup>Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang

Email: monang\_djp@yahoo.com

---

### ABSTRACT

---

This study aims to get an overview of the relationship between Indonesian economic democracy, a democratic economy that is democratic in facing the realities of globalization through Industry 4.0, so that we are aware and know how to behave. The method used in this research study is a causal study that compares facts, history, characteristics, and objectives, with the phenomenon of existing conditions through systematic theoretical literature studies and interviews, and is combined with Sukarno's thinking, realistic, dialectical, and revolutionary. The results of the study found that revolution 4.0 as an instrument of liberalist economy is the anti-thesis of Indonesia's economic democracy, independence economic that is democratic. Economic globalization struck the world a presence that must be accepted, but not for granted. Globalization is "*sine the qua non*" something that must be done because of reality.

**Keywords:** Democracy, Independence, Globalization, Industry 4.0

---

### ABSTRAK

---

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran bagaimana relasi demokrasi ekonomi Indonesia, ekonomi Berdikari yang bersifat kerakyatan dalam menghadapi realitas perkembangan globalisasi melalui Industri 4.0, sehingga kita sadar dan tahu bagaimana bersikap. Metode yang digunakan dalam kajian penelitian ini adalah studi sebab akibat yang membandingkan antara fakta, sejarah, sifat karakteritik dan tujuan, dengan fenomena situasi kondisi yang ada melalui kajian literatur teoritik sistimatis dan interview, dan dikombinasikan dengan cara berpikir Sukarno, realistik, dialektis dan revolusioner. Hasil dari kajian ditemukan bahwa revolusi 4.0 sebagai instrumen ekonomi liberalis adalah anti tesis dari demokrasi ekonomi Indonesia, ekonomi Berdikari yang bersifat kerakyatan. Globalisasi ekonomi melanda dunia suatu kehadiran yang harus diterima, tetapi bukan untuk disetujui begitu saja. Globalisasi merupakan "*sine the quanon*" sesuatu yang harus dilakukan karena suatu realitas.

**Kata Kunci:** Demokrasi, Berdikari, Globalisasi, Industri 4.0

---

### PENDAHULUAN

Berikut disarikan pesan sejarah Bung Karno pada murid-muridnya (1958-1959). Sifat dan watak Imperialisme di dunia pada masa nya berbeda-beda satu negara dengan negara lain sesuai dengan kondisi sumber bahan baku yang dimiliki negara asalnya. Negara yang memiliki bahan mentah sangat banyak itu sifat imperialisme-nya sangat lah royal, karenanya berawatak liberal. Amerika ketika menjajah Filipina liberal sekali sekolah universitas dibangun. Beda dengan India Imperialisme Inggris dengan latar belakang bahan



baku yang agak cukup tidak sebanyak Amerika, imperialismenya berwatak setengah royal maka wataknya semi liberal. Sifatnya setengah menindas setengah lapang dada, kapitalsnya bersifat setengah royal. Dengan kondisi tersebut dalam masyarakatnya masih ada kaum menengah dan borjuis, maka bentuk perlawanannya tidak sekeras kita yang berhadapan dengan imperialisme Belanda. Imperialisme Belanda dengan latar belakang yang sangat kurang bahan bakunya. benar benar semi ortodok setengah kikir.

Praktek kolonialisme imperialisme Belanda di Indonesia yang semula dengan imperialisme dagang, kemudian berubah menjadi imperialisme modern. Berbeda dengan India yang berhadapan dengan Imperialisme dagang (Handells Imperialisme), yang mensyaratkan adanya kemauan beli dan daya beli untuk membeli hasil Industri Inggris yang over produksi. Di Indonesia yang terjadi adalah Finanz kapital ( imperialisme modern), penanaman modal asing mulai masuk dari berbagai negara Eropa. Imperialisme Belanda semula melakukan imperialisme dagang, kemudian dengan semakin menumpuknya kapital berubah menjadi imperailisme Finanz Kapital. Suatu praktek ekonomi dimana uang dibawa kembali ke Indonesia ditanamkan kembali ke berbagai objek seperti pabrik gula, teh kopi karet sawit, pertambangan dsb.

Dalam upaya menangguk keuntungan optimal maka biaya harus dikecilkan. Hal ini dilakukan dengan ordonansi (*grondbuurordonantie*) pertengahan abad 19. Dengan ordonasi ini memberi kesempatan pengusaha asing menyewa tanah rakyat dengan harga sangat murah untuk ditanami teh kopi sawit dsb. Bila handels Imperialisme Inggris di India menaikkan standart hidup, sebaliknya dengan finanz kapital imperialisme Belanda malah menekan standar hidup. Dengan standart hidup yang rendah rakyat sudah senang menerima sewa walau dengan harga sangat murah. Demikian juga upah buruh sangat murah. Segalanya dibuat sangat minimal, pakaian makanan, minuman. Sukarno menyatakan bahwa rakyat Indonesia “*een volk van koelies en een kolie onder de natie*” menjadi kuli di negaranya sendiri. Seiring dengan itu handels kapital membawa tekstil yang sudah jadi dari Twente ( Belanda) ke Indonesia mematikan kelas menengah dan borjuis kita. Ini terjadi karena impor sangat murah sekali, tidak seperti impor Inggris di India. Akibat perlakuan ini akhirnya kita menjadi bangsa kelas kecil. Semua masyarakat berkelas kecil apapun jenis pekerjaannya.

Dengan alasan kelas masyarakat yang serba kecil (marhaen) itulah Sukarno berkesimpulan pergerakan untuk menggoyahkan Imperialisme haruslah terdiri dari gabungan kekuatan semua yang kecil kecil itu, karena kelas menengah atau bojuis Indonesia sudah tidak ada lagi. Karena itulah sejak semula ide mempersatukan kita itu adalah keaslian Indonesia, nilai mutiara yaitu gotong royong untuk membunkam Imperialisme, bersatu dan berdiri diatas dasar revolusioner. Dengan latar belakang itulah Sukarno mencari formula sebagai *weltanschuung* agar Indonesia dapat meletakkan bangsa yang akan diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Pancasila disamping sebagai *weltanschuung* juga sebagai alat pemersatu. “Siapa yang tidak mengerti bahwa kita hanyalah dapat merdeka dan berdiri tegak merdeka jikalau kita bersatu, siapa yang tidak mengerti itu maka tidak akan mengerti Pancasila”. Demikian dikutip sebagian dari penjelasan Sukarno tentang sejarah lahirnya Pancasila di depan murid-muridnya sebagai bahan materi kursus-kursus Pancasila yang dilaksanakannya di Istana negara , Jakarta pada tahun 1958 dan kuliah umum pada Seminar Pancasila di Jogjakarta 1959 ( Sukarno, 1986).

Penggalan penjelasan sejarah diatas perlu dan penting diingatkan kembali, karena tanpa membaca dan mengerti sejarah, bangsa Indonesia tidak akan mengerti apa dan bagaimana situasi saat itu sehingga Sukarno sampai pada sebuah kesimpulan diperlukannya ikatan nilai yang dimiliki bersama sebagai sebuah alat pemersatu melawan penjajah dan sekaligus sebagai dasar negara. Dari penjelasan tersebut kita belajar bahwa sebuah tesis ditemukan setelah Sukarno dengan demikian banyak literatur yang dipelajarinya



mempelajari sangat dalam tentang situasi kondisi masyarakat dengan membandingkan peristiwa –peristiwa yang terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi terlebih juga terjadi di negara negara luar. Hal ini penting bagi bangsa Indonesia dalam membaca situasi dan kondisi saat ini sebelum membuat sebuah kebijakan. Inti sejarah yang kita pelajari dari perjuangan Indonesia melawan kolonialisme imperialisme adalah rakyat Indonesia harus bersatu dalam tujuan (*samen bundeling van alle revolusionaire krachten*) (Sukarno 1960) untuk mencapai cita-cita keadilan sosial dengan alat persatuan gotong royong. Bersatunya rakyat Indonesia adalah menjadi dasar perjuangan. Bangsa Indonesia yang seluruhnya kecil-kecil itu dalam kehidupan dalam pendidikan dalam segala hal bisa kuat mengalahkan kolonialisme dengan alat persatuan gotong royong.

### **Pancasila Statis dan Dinamis**

Dalam pada itu perlu pula dipahami apa yang dimaksud Pancasila sebagai dasar negara itu *statis* dan sekaligus dinamis menjadi *leidstar dinamis* sebagai penuntun dalam mencapai tujuan. Pancasila itu adalah nilai-nilai luhur yang digali dari budaya bangsa Indonesia dan nilai-nilai luhur itu adalah kepribadian bangsa Indonesia. Maka dari itu, Pancasila tidak dapat diubah. Namun demikian perlu dipahami bahwa nilai-nilai budaya itu juga terus bergerak dinamis sesuai dengan dinamika alam. Oleh karena itulah Pancasila itu dinamis. Sebagai bintang penuntun artinya Pancasila adalah pedoman dalam seluruh aspek kehidupan.

Dalam sidang-sidang *Dokuritsu Tyoosakai* direkomendasikan oleh *ondergetekende* untuk menggunakan Pancasila sebagai dasar negara yang akan kita adakan. Dan kemudian Pancasila itu diterima di dalam *Djakarta Charter*. Kemudian diterima sesudah proklamasi kemerdekaan. Dasar negara yang kita butuhkan adalah : (1). Harus satu dasar yang mampu mempersatukan;(2).Satu dasar yang mampu memberi arah bagi aspek kehidupan negara kita. Katakanlah dasar statis, diatas mana kita bisa hidup bersatu, dan dasar dinamis, kearah mana kita harus berjalan, juga sebagai negara. Dalam membentuk negara itu harus dapat meletakkan negara itu atas suatu meja yang statis yang dapat mempersatukan segenap elemen di dalam bangsa itu, tetapi juga harus mempunyai tuntunan dinamis kearah mana kita gerakkan rakyat, bangsa, dan negara ini. Menjadi dasar statis dan yang dapat menjadi *leidstar* dinamis, *Leidstar*, bintang pimpinan. Jadi , jika Saudara ingin mengerti dan memahami Pancasila, lebih dahulu harus mengerti hal ini : meja statis, *Leidstar* dinamis. Kemudian kita lantas masuk kepada persoalan elemen-elemen apa yang harus di ikutsertakan di dalam meja statis atau *Leidstar* dinamis ini, (Sukarno, 1962 ). Demikianlah tiga pesan Sukarno pada murid muridnya yaitu keterkaitan sejarah, Pancasila statis dan Pancasila dinamis, untuk dipahami dengan seksama dalam upaya mengerti ajarannya tentang Pancasila secara utuh. Tanpa memahami tiga hal tersebut, Saudara tidak akan mengerti Pancasila. Kemudian untuk mencapai keadilan sosial itu sebagai tujuan proklamasi kemerdekaan RI ditambahkan 2 (dua) hal penting yaitu *cara nya* dengan *Trisakti* dan *Demokrasi Ekonomi*.( Pasal 33 UUD 1945). Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam sedangkan renungan isi jiwa yang mendalam itu ialah falsafah. Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia. Kalau filsafat bangsa itu adalah isi jiwa (suatu) bangsa, maka filsafat Pancasila itu ialah filsafat bangsa Indonesia ( Pidato Sukarno 1 Juni 1945). Mengacu pada filosofis tersebut, maka nilai-nilai Pancasila merupakan dasar falsafah (ideologi) negara, konsekwensinya setiap aspek penyelenggaraan negara harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila, termasuk juga sistem peraturan pada perundang-undangan Negara. Demikian Sukarno menjelaskan Pancasila didalam kursus-kursus yang dilaksanakannya baik di Jogja dan Jakarta (1959 – 1962). Makalah ini terdiri dari dua bagian yang mencoba untuk mendiskripkan pikiran-pikiran Sukarno dalam mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia



melalui gagasan besarnya pada Ekonomi Berdikari yang berdasarkan Pancasila dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya diteruskan dengan kajian ekonomi teoritik bagaimana demokrasi ekonomi (ekonomi berdikari) yang bersumber dari Pancasila dalam menghadapi fenomena Industri 4.0 sebagai realitas yang harus dihadapi.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pembangunan ekonomi**

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu *concern* dari setiap negara untuk dapat meningkatkan kemakmuran masyarakatnya. Sesuai dengan namanya, pembangunan ekonomi lebih memusatkan perhatiannya pada kegiatan pada sektor ekonomi. Menurut Meier and Rauch (2000:69), the term economic development constituted a persuasive definition : an increase in real income per head as a desirable objective. Dalam pengertian tersebut mengandung arti bahwa dalam proses pembangunan ekonomi mengarah pada ketercapaian ukuran kuantitatif dalam bentuk kenaikan pendapatan per kapita masyarakat. Sedangkan menurut Todaro and Smith (2009) : the goal of economic development in its simplest form is to create the wealth of a nation. Sebelum tahun 1970, pertumbuhan ekonomi yang cepat merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan. Namun demikian menurut Sen (1985:13) ..... *“it is simply not adequate to take as our basic objectives just the maximization of income or wealth. Economic growth cannot sensibly be treated as an end in itself. Development has to be more concerned with enhancing the lives we lead and the freedoms we enjoy. To value not only makes lives richer and more unfettered, but also allows us to be fuller social person”*.

Guna mencapai tingkat pendapatan per kapita yang semakin besar, maka dibutuhkan banyak sumber daya ekonomi. Contoh Sumber Daya Ekonomi tersebut misalnya ; tanah, tenaga kerja dan modal. Dalam ranah teoretis pembahasan mengenai proses pembangunan ekonomi dapat dijelaskan ke dalam tiga pemikiran besar, yakni pemikiran klasik, neo klasik dan endogen. Ketiga teori tersebut menjelaskan bagaimana faktor-faktor produksi yang ada dapat dipergunakan secara optimal untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di suatu negara.

Dalam konteks pembangunan ekonomi modern, pencapaian pertumbuhan ekonomi yang optimal dapat dijelaskan dengan detail melalui *new endogenous growth theory*. The new growth theory examines production functions that show increasing returns because of specialization and investment in knowledge capital. New knowledge is generated in the research sector (Meier and Rauch,2000:75). Sedangkan menurut Meier (2000) the new growth models therefore introduce the role of government and public policies in complementary investments in human capital formation and the encouragement of foreign private investments in knowledge-intensive industries such as computer software and telecommunications.

Sebelum tahun 1970-an, pertumbuhan ekonomi yang cepat telah dianggap sebagai ukuran yang baik dari pembangunan. Namun, menurut Sen (1999: 14) itu tidak cukup untuk menjabarkannya sebagai tujuan dasar kita yang hanya sekedar memaksimalkan pendapatan atau kekayaan. Pertumbuhan ekonomi tidak dapat diperlakukan sebagai tujuan akhir pembangunan itu sendiri. Pembangunan harus lebih peduli dengan mengangkat pri kehidupan yang kita inginkan dan kebebasan yang kita nikmati. Dalam nilai, tidak hanya membuat kehidupan lebih berkecukupan dan lebih bebas, namun juga memungkinkan kita untuk menjadi orang sosial yang lebih lengkap. Dalam kaitan inilah ekonomi Indonesia yang berdasarkan demokrasi ekonomi menjadi relevan karena dalam ekonomi nilai-nilai kemanusiaan harus menjadi bagian yang diutamakan. Nilai nilai kekeluargaan, kerjasama dan gotong royong sebagai jiwa bangsa Indonesia menjadi pegangan dalam menghadapi



perubahan paradigma masa sekarang yaitu revolusi industri 4.0. yang tidak terlepas dari ekonomi.

Dalam bidang ekonomi Sukarno berpendirian bahwa ekonomi tidak bisa dilepaskan dari politik, karena ekonomi bukan saja lepas dari eksploitasi tetapi lebih dari itu hilangnya imperialisme (Sukarno, 1962). Ampere bukan sekedar urusan isi perut tetapi juga urusan negara bebas merdeka dari imperialisme. Sejalan dengan itu perekonomian harus didasarkan pada kekuatan bangsa sendiri menolong dirinya sendiri (*selfhelp*). Dalam konteks revolusi kemerdekaan Indonesia, Sukarno menggambarkan Berdikari (*selfhelp*) sebagai cara meraih usaha dengan tenaga sendiri, kebiasaan sendiri, kepandaian sendiri, keringat sendiri, dan *fi'il fi'il* sendiri keberanian sendiri. Karena yang bisa menolong bangsanya adalah bangsa itu sendiri, maka perjuangan usaha harus bisa dilakukan oleh bangsa itu sendiri. Sejalan dengan itu *selfhelp* diiringi dengan sikap non-kooperasi yang menjadi azas perjuangan yang prinsipil.

Dalam non-kooperasi Sukarno menggambarkan sebagai berikut "...bagian yang terpenting daripada non-kooperasi kita ialah dengan mendidik rakyat percaya kepada diri kita sendiri-untuk meminjam perkataan kaum non-kooperasi Irlandia- "menyusun dan menggerakkan suatu massa-aksi, suatu *matchvorming* yang hebat dan kuasa! " ( dalam mencapai Indonesia merdeka). Dengan demikian *selfhelp* (berdikari) tidak bisa dipisahkan dari sikap non-kooperasi. Hal ini karena penjajah Belanda dan Indonesia memiliki agenda tujuan yang berbeda. Penjajah ingin menguasai negara jajahannya untuk sebesar-besarnya mengambil sumber-sumber alamnya, sedang Indonesia bertujuan untuk mensejahterahkan seluruh rakyatnya secara adil. Dua tujuan ini tidak bisa disatukan.

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia adalah suatu pernyataan kedaulatan bangsa sebagai sikap non-kooperasi untuk menentukan nasib bangsanya sendiri, tidak lagi tergantung pada bangsa penjajah asing. Bangsa adalah satu jiwa, sedangkan jiwa Indonesia merupakan jiwa-jiwa gotong-royong, jiwa persaudaraan dan jiwa kekeluargaan. Ketiga jiwa tersebut terumuskan ke dalam dasar idiologi negara, yakni Pancasila. Secara tegas Sukarno (Dibawah Bendera Revolusi, cetakan kelima, 2005:xv), Nasionalisme sebagai i'tikad; suatu keinsyafan rakyat bahwa rakyat itu adalah satu golongan, satu bangsa!. Bangsa merupakan kumpulan manusia yang mendiami sebuah wilayah yang memiliki budaya dan tujuan kolektif dalam kehidupannya (Sukarno). Memaknai bangsa merupakan suatu persatuan perangkat perangai yang terbentuk dari persatuan hal ihwal yang telah dijalani oleh rakyat itu (Otto Bauer).

Bangsa Indonesia tidak bisa lagi ditentukan oleh kemauan penjajah, Indonesia menolong dirinya sendiri. Dalam bidang ekonomi sikap menolong diri sendiri (berdikari) ini dituangkan dalam konsep Trisakti. Karena itu untuk menjadi bangsa yang besar salah satu semangat Trisakti yaitu kemandirian dibidang ekonomi justru haruslah menjadi target utama pembangunan nasional, sedangkan pertumbuhan ekonomi menjadi bagian pendukung kemandirian. Bagi Indonesia sistem ekonomi yang mandiri inilah merupakan demokrasi ekonomi yang tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pemahaman ini terkandung suatu moralitas ekonomi yang berpondasi pada kedaulatan rakyat (demokrasi) dimana kepentingan rakyat menjadi yang utama dari kepentingan perorangan (Moh Hatta). Dengan demikian hubungan ekonomi tidak berdasar pada asas individualisme tetapi berdasar asas kekeluargaan gotong royong (Bung Karno). Dengan demikian persoalan dalam ekonomi tidak sekedar soal persaingan namun juga soal kerjasama serta gotong royong sebagai ciri khas potensi modal sosial bangsa Indonesia yang suka hidup bergotong-royong, ada kebersamaan. Ternyata gotong-royong inilah yang diyakini benar oleh Sukarno sebagai solusi bagi masalah kemarginalan rakyat Indonesia. Gotong royong diterjemahkan sebagai menggunakan persatuan bahu-membahu dari orang-



orang yang senasib sepenanggungan untuk melawan penjajah, sumber malapetaka rakyat. Dimanapun dan kapanpun ada rakyat Indonesia yang dimarginalkan (diperbudak=dibuat tidak merdeka dalam tingkatan apapun), maka kegotong royongan haruslah dikedepankan (pidato Sukarno: lahirnya Pancasila).

Pendapat Sukarno sebagai *founding father* bangsa Indonesia ini ternyata sudah jauh hari dinyatakan-nya yaitu dalam amanat pada pembukaan kongres PNI tahun 1963 ia mengatakan, ”.....tetapi dasar yang harus dipakai untuk terlaksananya Amanat Penderitaan Rakyat tetap tidak berubah, yaitu dasar Pancasila 1 Juni 1945, dasar untuk menolong rakyat Indonesia yang kecil.....” seterusnya dikatakan:”.....inti dari pada Pancasila 1 Juni 1945 adalah sosialisme”. yaitu satu masyarakat Indonesia tanpa *exploitaion de l’homme par l’homme*. Itu tetap”. Maka dari itu menurutnya sosialisme di negara Indonesia adalah identik dengan gotong-royong, atau apabila hendak disarikan sekali lagi, pokok Pancasila 1 Juni 1945 adalah ”menyelesaikan masalah penindasan dengan jalan keluar gotong-royong”. Dalam konteks ini moral etika dan nilai sosial kemanusiaan sangat kental mendasari gagasan ini.

### **Ekonomi Berdikari dan Trisakti**

Ekonomi berdikari adalah suatu sistim perekonomian yang digagas Sukarno sebagai reaksi praktek ekonomi kolonial yang eksploitatif menindas yang bertentangan dengan nilai-nilai jiwa bangsa Indonesia yang mengenal nilai-nilai kebersamaan gotong royong. Menyusul gagalnya sistim liberal paska 1945 s.d 1959, Sukarno mengeluarkan dekritnya untuk kembali ke UUD 1945 sebagai syarat dalam upaya memenuhi impian rakyat pejuang kemerdekaan yang menginginkan adanya keadilan sosial di Indonesia. Dalam aturan operasionalnya diaturlah dalam Pasal 33 UUD 1945 tentang demokrasi ekonomi. Pada hakekatnya ekonomi berdikari ini dilaksanakan melalui jalan Trisakti ( berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam berkebudayaan.).

Menurut Sukarno (1962) berdikari adalah mahkota dari proklamasi Indonesia. Teori ini menekankan pada kemampuan bangsa yaitu melalui sumber modal dalam negeri baik dalam investasi maupun tenaga kerja sehingga dapat menuju kepada keadilan sosial, sebesar-besarnya untuk kemamakmuran rakyat. Rakyat diposisikan sebagai subjek bukan objek dalam sistim ekonomi ini. Oleh karena itu pendapatan nasional terbentuk dari bawah yaitu dari modal dalam negeri dari kekuatan sendiri, sedang modal LN adalah sebagai pelengkap. Oleh karenanya berdikari menentang kebijaksanaan minta-minta, menentang kebijaksanaan mengemis, apalagi mengemis pada musuh yang hanya akan memandang rendah martabat dan harkat martabat kebangsaan kita sebagai rakyat yang merdeka. Memperbesar dan mengembangkan produksi dari dalam negeri itulah dasar dan sumber kemakmuran yang harus kita laksanakan dan wujudkan. Ekonomi tidaklah bisa dilepaskan dari politik, karena ekononomi bukan saja lepas dari eksploitasi tetapi lebih dari itu hilangnya imperialisme (Sukarno, 1962). Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera) bukan sekedar urusan isi perut tetapi juga urusan negara bebas merdeka dari imperialisme.

Merujuk pada pemahaman ini maka target ekonomi adalah pada pemeratan ekonomi bukan pada semata pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian yang diutamakan disini adalah rakyat berproduksi bukan semata konsumsi sebagaimana terjadi saat ini. Dengan produksi melalui sumber dana dalam negeri dan tenaga kerja sendiri maka nilai tambah ada pada rakyat Indonesia. Hal ini berbeda dengan sistim Neolib dengan pasar bebas yang mengakibatkan diskonten kemiskinan pengangguran, kesenjangan dsb. Globalisasi ekonomi ternyata tidak menambah rakyat menjadi sejahtera, bahkan sebaliknya yang terjadi globalisasi ekonomi berdampak merusak perekonomian karena pasar bebas tanpa kendali mendorong pemodal kuat mendominasi pasar meminggirkan yang kecil-kecil. Globalisasi telah menimbulkan banyak kekecewaan (*discontents*) yaitu antara lain; kemiskinan, pengangguran, ketidakpastian hidup, ketidakstabilan, kerusakan budaya dst (Stiglitz, 2002).



Dalam konteks ini pada dasarnya, pembangunan mencerminkan sebuah inisiasi masyarakat dalam rangka pencapaian kesejahteraan hidupnya. Pembangunan dapat terjadi dengan melibatkan seluruh stakeholders suatu negara. Proses yang terjadi dalam pembangunan meliputi perencanaan, pengimplementasian dan evaluasi atas ketercapaian program pembangunan. Dalam hal ini stakeholders dapat berperan dalam ketiga proses pembangunan tersebut. Tinggi rendahnya tingkat ketercapaian dalam pembangunan akan menentukan derajat kesejahteraan yang dapat dicapai dalam proses pembangunan. Menurut Sen (1985:13), the ultimate goal of development is to enhance human capabilities, which is defined as “*the freedom that a person has in terms of the choice of functionings, given his personal features (conversion of characteristics into functionings) and his command over commodities...*”.

### **Karakteristik Ekonomi Kerakyatan ( Berdikari) dan Liberalisme**

Kedua sistem perekonomian ini sangat berbeda dan bahkan bertolak belakang samasekali, mengingat filosofi dan prinsip yang dibangun adalah sesuai dengan peradaban negara yang berbeda, bangsa barat dan bangsa timur Indonesia. Sejatinnya sistem ekonomi Pancasila adalah antitesa dari sistem ekonomi Neoliberalisme. Konsep kesejahteraan Indonesia didasarkan pada paham demokrasi Indonesia, dimana kemakmuran masyarakatlah yang menjadi prioritas bukan kemakmuran individu. Bagi bangsa Indonesia, kesejahteraan sosial memiliki posisi sentral dalam kemerdekaan Indonesia. Di dalam UUD 1945 asli sebelum berubah, terdapat pasal yang dikenal sebagai pasal ekonomi yaitu Pasal 33 yang berada dalam bab XVI UUD 1945 yang berjudul Kesejahteraan Sosial. Dengan demikian, seluruh kegiatan yang berorientasi pada penyelenggaraan perekonomian nasional dengan segala dinamikanya harus berujung pada terwujudnya kesejahteraan sosial.

Dalam tatanan undang-undang, maka konsep kesejahteraan sosial seperti dituangkan dalam Pasal 33 UUD 1945 adalah:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara
- (3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara.

Amandemen Undang-undang Dasar 1945 pada tahun 2002 menambahkan dua ayat pada Pasal 33 yaitu:

- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 33 ini adalah pengejawantahan dari Pancasila yang mempunyai jiwa kekeluargaan, persaudaraan dan gotong-royong sebagai nilai nilai moral yang dimiliki bangsa Indonesia yang merdeka, sehingga ekonomi tidak sekedar mencari untung maksimal semata ada nilai kemanusiaan. Sifat kemandirian, tidak adanya eksploitasi disegala bidang mewarnai semangat gotong royong rakyat Indonesia menuju masyarakat adil makmur, ada pemerataan ekonomi dan tidak ada lagi kemiskinan di Indonesia.

Sebaliknya dalam pemahaman kaum liberalis, manusia bersifat rasional yang juga disebut sebagai *homo economicus*, adalah agen pribadi sebagai pusat teori ekonomi neoklasik bertindak mencari untung, hedonis. Dia bertindak mementingkan diri sendiri, bersifat terus cari untung maksimal, bertindak independen, dan tidak dapat bekerjasama, sebagai terisolasi tidak bisa gabung dengan sesama masyarakat. Sebagaimana dinyatakan Teresa Lunati (1997 hlm 139) “ *He is a selfish, rasional, utility maximizer. He acts independently and non-cooperatively, as an isolated social atom with no sense of community or society, and his behavior is strictly motivated by*



*narrow self-interest. Economic man is a materialistic, totally unemotional and coolly calculating human being.* Individu semacam inilah yang menjadi masyarakatnya sistem ekonomi neolib, betapa tidak sesuai dengan akhlak masyarakat Indonesia yang dalam budayanya menjunjung tinggi sifat-sifat kekeluargaan dan gotong royong bertindak kolektif. Tidak terbayangkan bagaimana manusia rakus, mementingkan diri sendiri demikian bertingkah polah di pasar bebas, betul-betul bertentangan dengan kebanyakan manusia Indonesia.

Bagi seorang Alfred Marshall's (1988), ekonomi adalah "*economics is a study of mankind in the ordinary business of life*" sementara Lipsey (1988) "*economics is the study of the use of scare resources to satisfy unlimited human wants*". Ekonomi diartikan sebagai studi tentang bagaimana masyarakat memenuhi kesejahteraannya yang tidak terbatas dengan melakukan tindakan pemilihan sumberdaya karena sifatnya yang terbatas. Dengan demikian manusia harus melakukan tindakan pemilihan terhadap berbagai alternatif yang ada yang didasari suatu motif ekonomi selalu mencari memperoleh untung bagi dirinya. Maka untuk mencapainya manusia harus bersaing (kompetisi).

Kepentingan individu mencapai equilibriumnya terwujud dalam dimensi kepuasan maksimum dan laba maksimum atau biaya minimal kerugian minimal. Disinilah arti efisiensi ekonomi yang berdasar paham bersaing dan persaingan, siapa yang tidak efisien harus diwajarkan untuk kalah dan mati tersingkir, dilanjutkan dengan abstraksi tentang cikal bakal dicapainya *resource allocation* yang paling efisien. Maka tercetus paham adagium bebas untuk keluar dan bebas untuk masuk (*free entry and free exit*), bebas untuk hidup, dan bebas untuk gulung tikar, mengakuisisi atau diakuisisi (Swasono, 2005). Sebagaimana dinyatakan oleh Robert Heilbroner, (1994 hlm 255-256), *...market system promote amorality, it is not just an economic failure, but it is a moral failure..*

Sejatinya ilmu ekonomi adalah bagian ilmu *moral science* sebagaimana diakui sendiri pada awalnya oleh Adam Smith. Dengan begitu ilmu ekonomi juga mengenal adanya keadilan (*justice/fairness*), peduli terhadap persamaan (*equality*) dan pemerataan (*equity*) dan kemanusiaan (*humanity*) serta menghormati nilai-nilai agama (*religious values*). Sebagai ilmu moral, maka ilmu ekonomi secara etikal mengenal dan menghormati pula "kepentingan-kepentingan bersama", seperti *social welfare, public needs, public interest, solidarity*. Demikian sebaliknya menghormati pula "kepentingan-kepentingan individu" seperti halnya *liberty, the pursuit of happiness, compassion, goodness, altruism* dan semacamnya (Swasono, 2003). Untuk menunjukkan beberapa asumsi teori ekonomi liberal/neoliberal yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia dapat dilihat antara lain:

1. Asumsi dasar bahwa manusia bertindak rasional
2. Tidak diakui adanya sistem nilai (moral) dalam perekonomian
3. Menganut semata paham kompetitif (persaingan bebas sempurna)
4. Mitos-mitos kapitalisme Smithian:
  - Kebutuhan manusia yang sangat tidak terbatas
  - Sumber-sumber ekonomi yang relatif terbatas
  - Keinginan akan pemenuhan maksimal kebutuhan individual yang relatif terbatas

Berdasarkan pemahaman diatas dapat diuraikan karakteristik kedua mazab ekonomi, ekonomi Berdikari (bersifat kerakyatan) dan ekonomi Neo leberalisme sbb:

**Tabel 1.** Karakteristik Ekonomi Berdikari dan Liberal

No	Ekonomi Berdikari (bersifat kerakyatan)	Ekonomi Liberal
1	Bertindak manusiawi, homo ethicus	Bertindak rasional, homo economicus



2	Keluargaan dan gotong royong	Individualistis
3	Kerjasama dan kompetitif	Kompetitif .
4	Equity (persamaan-rasa)	Eksplloitatif
5	Equality ( pemerataan)	Maximum gain
6	Pasar terkendali	Pasar bebas
7	Moral science	Economic science
8	Mandiri	Ketergantungan
9	Sikap ideologis:berpihak kepada rakyat	Sikap ideologis: berpihak kepada pemodal
10	Strategi meningkatkan produktivitas rakyat (bottom up: pendapatan nasional totalitas pendapatan masyarakat dari pekerjaannya/aktivitasnya- cermin pemerataan)	Strategi meningkatkan produktivitas corporate (top-down).
11	Buruh dan karyawan sebagai partner berproduksi	Buruh dan karyawan sebagai faktor produksi

Ket: model diolah penulis

### Globalisasi dan Pembangunan Ekonomi

Dinamika perkembangan perekonomian dunia sekarang ditandai dengan adanya globalisasi pada berbagai aspek kehidupan. Globalisasi yang terjadi merupakan sebuah lanjutan dari cerita tentang liberalisasi yang bercirikan keterbukaan setiap negara terhadap interaksi dengan negara lain. Globalisasi dan liberalisasi tersebut mencerminkan bagaimana roh ekonomi liberal (*neoliberalism*) menjadi kekuatan dalam pembentukan perekonomian dunia yang menyatu dalam wilayah perekonomian global. Dalam hal ini ..”*The concept of globalization implies, first and foremost, a stretching of social, political and economic activities across frontiers such that events, decisions and activities in one region of the world can come to have significance for individuals and communities in distant regions of the globe* (Held, et.al, 1999:15). Sedangkan .....*The theoretical basis of globalization is the economic theory that is based on neoliberalism, which means it is a dynamic social process that targets the liberalization of international trade of goods and services* (Selimi, 2012).

Implikasi globalisasi ekonomi dalam perekonomian suatu negara dapat dilihat dari semakin intensifnya perdagangan internasional. Keterbukaan perekonomian suatu negara dengan negara lain ditandai dengan semakin mudahnya aliran barang dan jasa dalam kegiatan perdagangan dan aliran modal internasional. Negara dengan kemampuan ekonomi yang berdaya saing tinggi pada komoditi yang dimilikinya, maka negara tersebut akan dapat merasakan kemanfaatan dalam proses interaksi ekonomi yang terjadi. Sebaliknya negara dengan tingkat keunggulan daya saing perekonomian yang lebih lemah dibandingkan dengan negara-negara lainnya, oleh karena itu bisa dipastikan negara tersebut hanya akan menjadi penonton pada perekonomian global yang berkembang.

Pada sisi lain juga dapat dijelaskan bahwa globalisasi ekonomi yang terjadi membuka ruang terjadinya krisis ekonomi yang dapat merembet ke negara lain. Berbagai peristiwa ekonomi yang terjadi di luar negeri dapat dengan cepat memberikan dampak terhadap perkembangan ekonomi negara lain. Hal inilah yang kemudian disebut sebagai *contagion effect* (efek domino) dari sebuah peristiwa ekonomi yang terjadi di suatu negara dapat dengan cepat memberikan dampak terhadap perkembangan perekonomian negara lain. Peristiwa penting sebagai dampak dari *contagion effect* tersebut adalah terjadinya krisis ekonomi yang terjadi di ASEAN pada periode 1997/1998. Krisis ekonomi yang melanda beberapa negara ASEAN tersebut merupakan sebuah dampak dari terjadinya krisis mata uang di negara-negara Asia Timur (seperti Korea Selatan dan Jepang).



Implikasi globalisasi dalam pembangunan ekonomi suatu negara dapat dikaji ke dalam dua hal, yakni akibat yang bersifat positif dan akibat yang bersifat negatif. Dampak positifnya ialah setiap negara akan mendorong kemakmuran rakyatnya dengan pemenuhan barang dan jasa yang bisa dihasilkan dari kegiatan ekonomi internasional yang terjadi. Melalui prinsip keterbukaan ekonomi antar negara, maka ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat suatu negara akan dapat terjamin. Tidak hanya itu, karena barang dan jasa yang diperjualbelikan memiliki daya saing yang tinggi, maka barang dan jasa yang masuk ke pasar suatu negara pastilah berkualitas bagus. Dalam hal ini kemakmuran masyarakat akan dapat tercapai. Dalam konteks ini globalisasi ekonomi dapat mendorong perluasan pembangunan ekonomi yang terjadi di berbagai negara.

Sebaliknya globalisasi ekonomi berpotensi terjadinya marjinalisasi produk-produk lokal yang tidak mampu bersaing dengan produk dari luar negeri. Dalam hal ini komoditi yang dihasilkan pelaku usaha UMKM dapat menghadapi tantangan yang berat dari penetrasi produk dari luar negeri. Keunggulan bersaing yang dimiliki oleh produk dari luar negeri dapat menyebabkan pelemahan daya saing produk lokal hingga akhirnya pasar dalam negeri akan didominasi produk dari luar negeri. Marjinalisasi produk lokal dalam era global tersebut akan terus terjadi manakala tidak ada upaya untuk melakukan revitalisasi sektor UMKM dan penguatan sumber daya manusia di sektor UMKM. Dengan jumlah penduduk yang besar, maka suatu negara dapat memiliki kekuatan pasar yang besar. Namun demikian, pasar domestik tersebut akan dikuasai oleh pelaku ekonomi luar negeri manakala pelaku usaha dalam negeri tidak segera melakukan berbagai upaya antisipatif yang konstruktif.

Dampak buruk dari globalisasi ini sejatinya haruslah diwaspadai. Dalam pandangan Sukarno imperisliisme terus akan berubah sesuai situasi dan kondisi yang menyertainya. Sifatnya nya yang ekpolitatif tetap tidak akan berubah malah semakin meluas. Globalisasi dengan konsep menyatukan dunia dalam perdagangan dunia dengan tidak ada lagi batas-batas negara membuat praktek neo imperialisme semakin meluas. Karena itu Indonesia haruslah tetap berhati-hati pada setiap kebijakan ekonominya baik dalam hal perdagangan maupun keuangan. Perkembangan industri 4.0 dalam hal ini perlu disikapi dengan seksama dengan tetap mementingkan kepentingan nasional.

### **Globalisasi dan Identitas**

Negara negara modern umumnya mendasarkan indentitas bangsa sebagai ideologi dari aspek karakteristik seperti, bahasa, peninggalan sejarah, etnik dan lokasi geografis sebelumnya. Selama ini proses ideologi nasionalisme datang untuk mewujudkan keyakinan bahwa identitas nasional adalah bersifat fundamental dan alami (Basch,dkk, 1994:39). Namun demikian pandangan ini sangat berbeda dari klaim bahwa keberadaan dan identitas negara bangsa modern bergantung pada inti batin dari karakteristik yang tidak dapat diubah yang tertulis di zama dahulu kala. Para ahli sosial bersikeras bahwa identitas dibentuk dan di validasi selalu melengkapi kontruksi karaktetistik yang muncul dari karakteristik tambahan. Hal ini adalah karena: 1). Bahwa identitas sebagai eksistensi karakter bangsa selalu berproses (Hall,1997:2), demikian pula identitas tidak permanen (Melucci,1996:159). Melainkan pembentukan identitas melibatkan konstruksi dan rekonstruksi melalui peran, wajah dan keadaan masyarakat yang berbeda situasi (Melucci, 1996);2). Melalui identitas dapat mencakup beberapa perbedaan dalam diri nya sendiri (Hall, 1997:23).

Memang, setiap kali kekuatan globalisasi mengarahkan orang untuk mencari strategi perlindungan yang melibatkan upaya untuk menyelamatkan identitas yang terpusat dan terpusat di tempat-tempat di mana kita cenderung menemukan kebangkitan patriotisme dan jingoisme. Pandangan bahwa identitas nasional bersifat fundamental dan alami permanen dan sekaligus berproses adalah sejalan dengan pemahaman Sukarno perihal



Pancasila yang statis dan dinamis ( Sukarno 1 Juni 1945). Dalam konteks ini globalisasi dapat dipandang sebagai perubahan dari sebuah proses yang semula dikenal sebagai imperialsime berubah menjadi neo imperialisme atau globalisme. Pada tataran ideologis globalisme adalah tetap pada sifat dasar nya yng eksploitatif dan ini tetap kita tolak. Pada tataran praksis strategis (dinamis) bagaimana sikap kita atas perubahan kondisi dan waktu perlu melihat dalam bentuk bagaimana perubahan globalisasi ini dalam industri 4.0 .

#### **Golbalisasi dalam industri 4.0**

Perkembangan terintegrasi yang didorong oleh Industri 4.0 membentuk era baru globalisasi dan menimbulkan banyak pertanyaan tentang dampak perkembangan tersebut terhadap masyarakat. Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa globalisasi (terutama di era industri 4.0) adalah musuh terbesar zaman kita. Lonjakan ketimpangan pendapatan, polusi yang merusak planet kita, dan mesin yang menggantikan tenaga manusia hanyalah sebagian dari efek negatif yang dibawanya.

Namun globalisasi cenderung dibingungkan dengan globalisme - ideologi yang mendukung tatanan global neoliberal versus kepentingan nasional - yang merupakan penyebab sebenarnya dari ketidakpuasan, frustrasi, dan ketidakamanan terutama di masyarakat barat: bukan globalisasi semata. Demikian pula, ketidaksetaraan pendapatan berakar pada lembaga dan pemerintahan, yang memiliki hak istimewa bagi pemilik modal yang memungkinkan mereka memperoleh bagian PDB yang semakin besar. Memang benar bahwa revolusi industri biasanya mengubah lanskap pasar tenaga kerja karena dampak inovasi. Namun, ini seyogyanya tidak menyebabkan pengangguran massal. Sejarah memberi tahu kita bahwa penemuan baru sering kali menciptakan lebih banyak peluang dan dengan pekerjaan itu. Banyak dari kita bekerja di pekerjaan yang tidak ada saat kita remaja. Banyak orang menganggap bukanlah peningkatan pengangguran yang disebabkan oleh Industri 4.0, melainkan pekerjaan yang terganggu (*disruption*) oleh teknologi baru dan dampak langsung yang akan berdampak pada kehidupan mereka dan komunitas lokal (Moralis, 2018).

Di sisi lain, pasar tenaga kerja menjadi lebih terpolarisasi. Sekelompok elit terampil yang dapat menggunakan teknologi untuk menjadi lebih produktif, cenderung menggantikan tenaga kerja orang lain dan dibayar sesuai, yang secara substansial mengakibatkan ketimpangan pendapatan. Namun demikian, efek samping ini hanya bersifat peralihan dan tidak berskala besar, sedangkan dampak yang signifikan dapat ditimbulkan oleh kepemimpinan yang buruk dari pemerintah, perusahaan, dan akademisi. Faktanya, polarisasi pekerjaan dapat diperangi dengan secara proaktif mengatasi kesenjangan keterampilan di pasar. Dengan mempelajari tugas dan pekerjaan, dimungkinkan untuk memahami mana yang mudah diotomatisasi, sehingga berisiko menjadi tidak perlu. Di sisi lain, jika keterampilan individu dari tenaga kerja tersebut juga dianalisis, akan memungkinkan untuk mengidentifikasi bagaimana lagi para pekerja ini kemungkinan besar akan berhasil, dan kemudian membuat mereka dididik dalam keterampilan tersebut (Moralis, 2018).

Teknologi inovatif dapat mengarah pada pembuatan kebijakan yang berdampak pada pendapatan. Agar hasil ini lebih setara dengan semua anggota masyarakat, diperlukan kolaborasi yang lebih banyak dan lebih baik di antara kita semua. Menyelesaikan beberapa masalah paling mendesak di zaman kita hanya dapat dilakukan jika sektor swasta, akademisi dan pemerintah - mulai dari tingkat kota, hingga nasional dan kemudian internasional - mampu beradaptasi dengan perubahan dan bekerja sama menuju tujuan bersama yang lebih besar. Perubahan signifikan perlu terjadi dalam infrastruktur, pendidikan, regulasi, dan pemerintahan. Jelas, hal ini membutuhkan keberanian, kepemimpinan yang kuat dan kewirausahaan dari semua pihak yang terlibat dan perlu bekerja di seluruh tingkat geografis.



Dengan mengenali pentingnya gagasan (idea) dan nilai, Mokyr (2017) menggaris bawahi faktor utama yang mendorong tiga revolusi sebelumnya adalah pergeseran yang signifikan nilai elit penguasa, menempatkan sains dan teknologi tinggi dalam hierarki prestise sosial pada abad-abad sebelum dan selama revolusi industri. Karena itu pentingnya sekelompok kecil ahli yang mendefinisikan konsep dan pengetahuan teoritis baru dan kemudian peran kelompok besar perakit yang mengadopsi teknologi revolusi industri dan melalui modifikasi dan inovasi tambahan mereplikasinya dalam skala yang lebih besar. Selanjutnya dengan menguraikan karakter utama revolusi industri, (Mokyr, 2018) menyebutkan bahwa pembentukan pengetahuan dan tatanan kelembagaan seperti ideologi, konsep dan kepercayaan bersama, memainkan peran penting dalam kemunculan teknologi baru dan pertumbuhan ekonomi selanjutnya.

Dengan demikian dengan membuat ikhtisar temuan teoritis dari revolusi sebelumnya, dapat diuraikan bagaimana tren revolusi 4.0 melampaui tingkat inovasi teknologi sederhana dan membentuk langkah baru menuju transformasi yang lebih cocok dan baik. Dibawah ini dipaparkan karakteristik Revolusi Industri 4.0 sebagai berikut.

**Tabel 2.** Karakteristik Industri 4.0

No	Karakteristik Industry 4.0	Industry 4.0
1	Kemajuan tidak terbatas pada satu sektor tetapi ada dimana-mana	Inovasi digital akan mengganggu ( <i>disrupt</i> ) semua sektor seperti: manufaktur, transportasi, pengembangan kota, utilitas, pembangkit tenaga listrik, pertanian, logistik, pertanian, logistik, dan lain lain
2	Teknologi Tujuan Umum ( <i>General Purpose Technology</i> )	Teknologi industri 4.0 dapat diklasifikasikan sebagai GPT, karena teknologi ini diadopsi secara universal sebagai tulang punggung teknologi baru.
3	Munculnya organisasi baru dan bentuk perusahaan	Organisasi berbasis platform yang muncul mengungguli dan menantang organisasi berbasis proses yang membutuhkan bentuk organisasi baru.
4	Jaringan dan standardisasi	Inovasi menjadi permainan koordinasi yang lebih besar, tergantung pada jaringan dan efek standarisasi dalam ekosistem inovasi.
5	Pembentukan Pengetahuan (Knowledge Formation)	Akumulasi pengetahuan empiris baru yang cukup besar diharapkan. Berdasarkan data yang disediakan oleh sensor: AI dan pembelajaran mesin akan berkontribusi lebih lanjut untuk model data yang muncul.
6	Keterampilan (skil) SDM dan distribusi pendapatan, pengangguran teknologi	Meningkatnya tingkat ketidaksetaraan global, meningkatkan perdebatan tentang pengangguran teknologi, meningkatkan kebutuhan akan keterampilan digital baru, dan peningkatan kualitas SDM
7	Dampak Globalisasi	Komunikasi dan informasi mengalir seiring dengan pergerakan manusia, modal, dan barang yang semakin intensif disepanjang tahap revolusi industri.

Sumber: Model Mokyr (1988), diolah kembali oleh Moraliysa (2018)



## **METODE PENULISAN**

Metode yang dipergunakan dalam kajian ini ialah studi sebab akibat yang membandingkan antara fakta, sejarah, sifat karakteritik dan tujuan, dengan fenomena situasi kondisi yang ada melalui kajian literatur teoritik sistimatis dan interview, sebagaimana dipraktekkan Mokyr (1988) yang dikembangkan kembali oleh Moraliysa dan Sofia (2018), dan sekaligus dikombinasikan dengan cara berpikir Sukarno, realistik, dialektis dan revolusioner.

## **PEMBAHASAN**

Berdasarkan analisa perbandingan diatas dapat mencari tahu dampak dari sebuah teknologi baru jauh lebih besar dalam skala besar. Lebih jauh perlu digarisbawahi bahwa teknologi baru mengarah ke perubahan organisasi dan kelembagaan yang lebih substansial, karena teknologi 4.0 membuka dasar untuk bentuk bentuk baru organisasi jaringan, mekanisme kolaborasi untuk inovasi terbuka, dan sinergi antar organisasi yang memperluas rantai nilai. Perubahan besar ini tidak terlepas dari perubahan nilai nilai budaya yang meyertainya.

Lebih jauh penting untuk dipahami bahwa sebuah teknologi baru dan inovasi tidak “netral” karena teknologi ini menciptakan ketergantungan jalan dan dengan demikian standarisasi dan adopsi teknologi menentukan lebih lanjut distribusi kekuasaan dalam masyarakat dan dominasi pola pikir ideologi tetentu. Ketergantungan jaringan dan standarisasi membuat inovasi dalam industri 4.0 sebagai permainan koordinasi yang jauh lebih kompleks, karena teknologi dan inovasi baru harus sesuai dengan kerangka kerja teknolgi yang sudah ada. Dalam konteks ini penting dipahami dan dikritisi bahwa industri 4.0 adalah sebuah upaya mensinergikan semua potensi global dalam satu mata rantai perekonomian global. Karena itu roh liberalisme semangat individualisme, bertindak rasional, mencari keuntungan maksimal menjadi tujuan utama sebagaimana terurai dalam tabel 1.

Sebagaimana dinyatakan Lunati (1997:139) “... Dia egois, rasional, semata cari untung semata. Dia bertindak secara mandiri dan non-kooperatif, sebagai atom sosial yang terisolasi tanpa rasa komunitas atau masyarakat, dan perilakunya sangat dimotivasi oleh kepentingan pribadi yang sempit. Manusia ekonomi adalah manusia yang materialistik, sama sekali tidak punya rasa dan segala sesuatu berperhitungan”. Individu semacam inilah yang menjadi masyarakatnya sistem ekonomi neolib, betapa tidak sesuai dengan akhlak masyarakat Indonesia yang dalam budayanya menjunjung tinggi sifat-sifat kekeluargaan dan gotong royong bertindak kolektif. Tidak terbayangkan bagaimana manusia rakus, mementingkan diri sendiri demikian bertingkah polah di pasar bebas, betul-betul bertentangan dengan kebanyakan manusia Indonesia.

Namun demikian dalam praktek revolusi 4.0 untuk dapat efektif berjalan, salah satu karakter syarat yang harus dilaksanakan adalah kehadiran skill yang tinggi dan jaringan yang luas. Kedua syarat ini menjadi mutlak sekaligus dijalankan untuk bisa jalannya sebuah otomasi digital. Dengan demikian kedua hal ini sesungguhnya menjadi domain pada semangat gotong royong yang dimiliki bangsa Indonesia. Pada posisi ini gotong royong sebagai identitas nasional Pancasila menjadi sangat relevan untuk menjadi dasar platform pelaksanaan digitalisasi di Indonesia (revolusi Industri 4.0). Dasar kebijakan digitalisasi industri 4.0 yang diinisiasi Pemerintah haruslah berpihak pada kepentingan nasional, sebagaimana diamanatkan demokrasi ekonomi berdasar trisakti dengan menggunakan kekuatan sendiri. Dengan adanya kerja kolektivitas terkordinasi dalam semangat gotong royong, diharapkan *skill* individu dapat berimbas pada kolega kerja tim tim ekonomi di lapangan bisnis sehingga mesin ekonomi bergerak bersama dari produksi distribusi dan



konsumsi. Dampak disrupsi ekonomi yang berpotensi munculnya pengangguran diharapkan dapat diminimalisir. Sehingga harapan pemerataan hasil ekonomi secara berkeadilan dapat ditegakkan.

Perlu diingat bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat diperlakukan sebagai tujuan akhir pembangunan itu sendiri. Pembangunan harus lebih peduli dengan mengangkat pri kehidupan yang kita inginkan dan kebebasan yang kita nikmati. Dalam nilai, tidak hanya membuat hidup lebih kaya dan lebih bebas, tetapi juga memungkinkan kita untuk menjadi orang sosial yang lebih lengkap. Dalam kaitan inilah ekonomi Indonesia yang perdasarkan demokrasi ekonomi menjadi relevan karena dalam ekonomi nilai-nilai kemanusiaan harus menjadi bagian yang diutamakan. Nilai-nilai kekeluargaan, kerjasama dan gotong royong sebagai jiwa bangsa Indonesia (Pancasila dinamis) menjadi leitstar dalam menghadapi perubahan paradigma saat ini menghadapi kehadiran industri 4.0. Demikian pula tuntutan dipenuhinya spesialisasi keahlian digital dan perlunya adanya investasi modal pengetahuan dan teknologi tinggi (Meier and Rauch, 2000:75) sesuai pula dengan nilai-nilai pada ekonomi berdikari yang mensyaratkan kepercayaan diri yang tinggi dengan pengetahuan tinggi sebagai identitas nasional yang harus tetap dipertahankan.

Revolusi Industri 4.0 juga menghadirkan tantangan dan peluang. Dari sisi permintaan, revolusi industri 4.0 berpotensi mendorong tingkat pendapatan dan meningkatkan kualitas kehidupan penduduk dunia. Hingga saat ini, mereka yang mendapat manfaat maksimal darinya ialah konsumen yang dapat membeli, mengakses serta mengeksplorasi dunia digital. Dengan adanya teknologi memungkinkan produk dan layanan baru yang meningkatkan efisiensi dan kesenangan hidup suatu individu. Memesan jasa transportasi, memesan jasa penerbangan, membeli suatu produk, mengurus pembayaran, mendengarkan musik, menonton film, atau bermain videogame – hal – hal tersebut pada masa sekarang dapat dilakukan diberbagai lokasi dan dapat dilakukan dari jarak jauh. Pergeseran besar di sisi permintaan juga terjadi, karena meningkatnya transparansi, keterlibatan konsumen, dan pola pada perilaku konsumen yang baru (semakin dibangun berdasarkan akses ke jaringan dan data seluler) memaksa perusahaan untuk menyesuaikan cara mereka merakit, memasarkan, dan menyampaikan produk dan jasa layanan.

Di masa yang akan datang, inovasi teknologi tentu akan berpotensi condong pada sisi penawaran, akibat dari peningkatan efisiensi dan produktivitas jangka panjang. Biaya transportasi dan komunikasi akan turun, logistik dan rantai pasokan global akan menjadi lebih efektif dan biaya perdagangan akan berkurang, yang semuanya akan membuka pasar baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun pada saat yang bersamaan, seperti dinyatakan oleh ahli ekonomi bernama Erik Brynjolfsson dan Andrew Mc Afee, dalam laporan Klaus Schwab (Founder And Executive Chairman World Economic Forum, January 17, 2016), revolusi industri 4.0 dapat menghasilkan suatu ketimpangan yang lebih besar, terutama dalam potensinya untuk mengguncang pasar sektor tenaga kerja. Karena otomatisasi menggantikan tenaga kerja konvensional (manusia) di berbagai sektor perekonomian, perpindahan bersih pekerja oleh mesin dapat memperburuk kesenjangan antara pengembalian modal pendapatan bagi perusahaan dan pengembalian apa yang diterima oleh tenaga kerja. Di sudut pandang lain, ada kemungkinan juga bahwa perpindahan pekerja karena kehadiran teknologi, akan menimbulkan peningkatan laba ataupun pendapatan bersih dalam pekerjaan yang aman dan bermanfaat.

Ketidaksetaraan ekonomi (ketimpangan pendapatan) merupakan masalah sosial terbesar yang berkaitan dengan Revolusi Industri 4.0. Penerima manfaat terbesar dari adanya inovasi cenderung menjadi penyedia modal intelektual dan fisik - inovator, pemegang saham, dan investor - yang menjelaskan meningkatnya ketimpangan kekayaan antara mereka yang bergantung pada modal dibanding dengan tenaga kerja. Oleh karena



itu, kehadiran teknologi justru bisa menjadi salah satu indikator kenapa pendapatan tidak berkembang, atau bahkan menurun. Bagi sebagian besar penduduk di negara-negara maju yang berpenghasilan tinggi: permintaan akan pekerja dengan keterampilan tinggi meningkat sementara disisi permintaan akan pekerja dengan latar belakang pendidikan rendah dan keterampilan rendah menurun.

Secara keseluruhan, terdapat empat dampak utama revolusi industri 4.0 pada bisnis - pada harapan pelanggan, pada peningkatan produk, pada inovasi kolaboratif dan pada bentuk organisasi (Klaus, 2017) . Baik konsumen maupun bisnis, konsumen semakin menjadi episentrum ekonomi, yang keseluruhannya ialah tentang meningkatkan cara konsumen dilayani. Selain itu, produk dan layanan fisik kini dapat ditingkatkan dengan kemampuan digital yang meningkatkan nilainya. Tehnologi baru membuat aset bertahan lebih lama dan tangguh, sementara data dan analitik mengubah cara pemeliharannya. Sementara itu, dunia pengalaman konsumen/pelanggan, layanan berbasis data, dan kinerja aset melalui data analitik, membutuhkan bentuk kerjasama baru.

Peran pemerintah akan semakin sentral dalam menghadapi tekanan untuk mengubah pendekatan mereka saat ini terhadap keikutsertaan publik dan penyusunan kebijakan, karena peran sentral pemerintah dalam melaksanakan kebijakan berkurang karena sumber persaingan baru dan redistribusi serta desentralisasi kekuasaan yang dimungkinkan oleh adanya teknologi baru. Pada akhirnya, kecakapan sistem pemerintah dan otoritas publik untuk menyesuaikan diri akan menentukan kelangsungan hidup mereka. Jika mereka terbukti mampu merangkul dunia perubahan yang mengganggu, menyerahkan struktur pada tingkat transparansi dan efisiensi yang akan membuat mereka untuk bertahan pada keunggulan kompetitif mereka. Jika mereka tidak dapat beradaptasi dan berevolusi, mereka akan dihadapkan oleh permasalahan yang semakin kompleks.

Mengingat laju perubahan yang sangat cepat dan akibat luas revolusi industri 4.0, para pembuat undang-undang dan pembuat peraturan ditantang hingga pada kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rancangan kebijakan dengan pendekatan linier dan mekanistik, mengikuti pendekatan “top down” yang ketat tidak bisa lagi dipertahankan. Sama seperti sektor swasta yang semakin mengadopsi tanggapan lugas terhadap perkembangan perangkat lunak dan operasi bisnis secara lebih umum. Ini berarti pembuat regulasi harus terus beradaptasi dengan kondisi baru yang cepat berubah, menciptakan kembali diri mereka sendiri sehingga mereka dapat benar-benar paham dengan apa yang mereka atur. Dalam pelaksanaannya, pemerintah dan *stakeholders* terkait perlu berkolaborasi erat dengan bisnis dan masyarakat sipil.

Adanya Revolusi Industri 4.0, tidak hanya akan merubah apa yang kita lakukan tetapi juga sekaligus akan mempengaruhi identitas kita dan semua permasalahan yang terikat dengannya: rasa privasi kita, gagasan kita tentang kepemilikan, pola konsumsi kita, waktu yang kita korbankan untuk bekerja dan bersantai serta bagaimana kita mengembangkan karir kita, menumbuhkan jiwa trampil kita, bertemu orang dan mengasuh hubungan. Kita semua bertanggung jawab untuk memandu perubahannya, dalam keputusan yang kita buat setiap hari sebagai warga negara, konsumen, dan investor. Karena itu, kita diusahakan dapat menangkap peluang dan kekuatan yang kita miliki untuk membentuk Revolusi Industri 4.0 dan mengarahkannya ke masa mendatang yang mencerminkan tujuan dan nilai kita bersama.

## **KESIMPULAN**

Indonesia memiliki endowment ekonomi yang sangat besar baik berupa sumber alam dan penduduk yang besar. Dengan penduduk berjumlah hampir 280 juta jiwa menjadi incaran tujuan market Internasional. Perekonomian tidak terlepas dari politik dan ideologi,



sebagaimana Yoan Robinson (pemenang nobel ekonomi, 1962) sudah memperingatkan bahwa bertumbuhnya sebuah perekonomian sebuah negara adalah berakar pada nasionalisme bangsa tersebut. Pada sisi lain penting dipahami dan dikritisi bahwa teknologi industri 4.0 adalah alat dari imperialisme global yang memiliki ideologi global yang berupaya mensinergikan semua potensi global dalam satu mata rantai perekonomian global untuk kepentingan globalis dimana roh liberalisme semangat individualisme, bertindak rasional, mencapai keuntungan maksimal menjadi tujuan utama.

Mencermati perbedaan yang sangat mendasar pada kedua sistem perekonomian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa demokrasi ekonomi Indonesia dalam bentuk ekonomi berdikari dengan sifat kerakyatannya adalah anti tesis dari pada ekonomi liberal. Sebagai bangsa yang kemerdekaannya melalui suatu perjuangan revolusioner, dalam usianya yang memasuki usia hampir 76 tahun, di-dalam gelombang globalisasi ekonomi, Indonesia nampaknya masih harus terus berjuang menuju suatu masyarakat yang dicita-citakan tersebut. Globalisasi ekonomi melanda dunia suatu kehadiran yang harus diterima, tetapi bukan untuk disetujui begitu saja. Globalisasi merupakan "*sine the quanon*" sesuatu yang harus dilakukan karena suatu realitas.

Artinya bukan suatu yang baik tapi harus kita terima karena tahap kerelaan. Agar Demokrasi Ekonomi kita tidak hilang kita perlu meyakinkan masyarakat untuk pemahaman ini karena Globalisasi bukanlah tujuan, tetapi seperti wabah yang datang yang harus dihadapi mengingat sebagian masyarakat memahaminya sekarang seolah olah Globalisasi menjadi tujuan. Dengan kehadiran revolusi industri 4.0 yang membawa misi kapitalis global untuk menguasai perekonomian global, maka yang diperlukan oleh Indonesia adalah perangkat sosial yang mampu mendeteksi dan mengatasi penguasaan teknologi global. Dalam hal ini dasar negara Pancasila ditempatkan pada posisi dinamis sebagai bintang penuntun yang memberi arah laju teknologi industri 4.0. Pemerintah perlu mengambil sikap aktif mengidentifikasi celah celah negatif dalam penerapan industri 4.0 khususnya dibidang ekonomi sehingga basis sistem perekomian nasional tetap pada jalur demokrasi ekonomi Indonesia yang berpedoman pada Pasal 33 UUD 1945. Dalam tataran implementasi digitalisasi penggunaan kecerdasan buatan perlu dilakukan identifikasi cermat dan melakukan replikasi platform penyesuaian dengan nilai nilai ke Indonesiaan. Pada masyarakat khususnya pemuda kaum milineal perlu dilakukan tidak saja pengetahuan terkait teknis digitalisasi tetapi juga edukasi pemahaman demokrasi ekonomi khususnya ekonomi berdikari, sehingga digitalisasi di Indonesia mampu mendorong aktivitas ekonomi sesuai nilai budaya bangsa Indonesia.

Asumsi dasar teori ekonomi neo klasik bahwa adanya kelangkaan (*scarcity*) sumber sumber ekonomi sehingga barang dan jasa menjadi langka sehingga diperlukan kompetisi sempurna untuk pemenuhan utilitas maksimum masyarakat, perlu dipertanyakan karena dengan temuan teknologi tinggi barang dan jasa dapat tersedia. Sebuah paradox, karena itu yang diperlukan adalah inovasi inovasi baru, maka kompetisi sifatnya terbatas dan yang diperlukan adalah kerjasama dan gotong royong dalam semua tahapan produksi, distribusi dan konsumsi.

### **Rekomendasi**

1. Untuk kepentingan ekonomi nasional dan keamanan data, sudah saatnya Pemerintah membuat skala prioritas proyek *Platform* Digital Nasional sendiri dalam industri 4.0 sehingga tidak tergantung pada Platform Global.
2. Sebagai bentuk kegotong royongan nasional, pemerintah perlu mendorong pihak pihak swasta nasional untuk mampu dan bisa membuat replikasi platform global yang sudah ada, sesuai kepentingan nasional yang tidak bisa dihapus aplikasinya,



membuat pengguna dapat menggunakan aplikasi berulang ulang. Dengan demikian, pendapatan nasional tidak bebas mengalir untuk kepentingan platform Global baik Google dan Apple. Contoh kasus China yang bisa buat replika *platform* “Xiomy” sesuai dengan kepentingan pengguna nasionalnya.

3. Pemerintah perlu membuat regulasi khusus yang mampu mendeteksi transaksi on line untuk dapat dikenakan pajak.

## DAFTAR RUJUKAN

- Gatut, Saksono (2007). *Marbaenisme Bung Karno, Rumah Belajar* Yabinkas, Yogyakarta : Ardana Media Yokyakarta.
- Held, D. Mc Grew, A., Goldblatt, D., & Perraton, J.,(1999). *Global transformations: Politics, Economics, and Culture*, Stanford, CA: Stanford University Press
- Klaus, Schwab, (2016). *The 4th Industrial Revolution: What It Means, How to Respond*, Founder And Executive Chairman World Economic Forum, Januari
- Lipsey, Richard and Steiner Peter, (1988). *Economics*, Sixth edition, New York : Harper & Row Publishe
- Mora Liyska, Monika, (2018). *The Industri 4.0 Ideologi Behind The Revollutionary Trnsformation in SMES*
- Meier, Gerald M and James E Rauch, (2000). *Leading Issues in Economic Development*, Seventh Edition, Oxford:Oxford University Press
- Mukhlis Imam, Timbul H. Simanjuntak, (2015). *Human Resource Development Based Local Wisdom in The Era of the ASEAN Economic Community in Indonesia*, Artikel dipresentasikan pada international conference : The 2nd CHREST International Conference, 10-11 Juni, Kuala Lumpur, Malaysia
- Teresa, Lunati,(1997). *Ethical Issue in Economics: from Altruism to Cooperation to Equity* London:Mac Millan Press
- Robert, Heilbroner dan Lester C Thurow, (1994). *Economics Explained*, New York: Simon Schuster
- Pidato lahirnya Pancasila 1 Juni 1945* cetakan II, Agustus 2008 Simpatisan Pembela Pancasila 1 Juni
- Robinson, Joan, (1962). *Economic Philosophy*, Chicago:Aldine Publishing
- Selimi, Nasir, (2012). *Integration and Economic Globalization: Analysis of Selected Western Balkans' Countries*, International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences Volume 2, Issue 4 :362-375
- Sen, A.,(1985). *Commodities and Capabilities*. Amsterdam: North Holland
- Simanjuntak, Timbul, (2011). *Mengapa kita memilih ekonomi Kerakyatan (Pancasila)*
- Simanjuntak, Timbul, (2018). *Nasionalisme dan Pembangunan Ekonomi*, Tulungagung : Cahaya Abadi
- Simanjuntak, Timbul, Revitalisasi Pancasila Dalam Praktek Ekonomi Berdikari, Seminar dan Dialog pada acara Diskusi Ekonomi Berdikari Yayasan Bung Karno, 2017
- Simanjuntak Timbul, (2015). *Revitalisasi Ekonomi Konstitusi-Pancasila sebagai jaminan terwujudnya keadilan sosial di Indonesia*, Artikel Seminar Kolegial Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang
- Simanjuntak, Timbul (2016). *Pancasila Dasar Pembangunan Kebudayaan Indonesia*, Jakarta: Yayasan Bung Karno
- Sukarno, (1986). *Pancasila Sebagai Dasar Negara*, Jakarta : Inti Idayu Press-Yayasan Pendidikan Soekarno
- Sukarno, (2005). *Di Bawah Bendera Revolusi*, Cetakan Kelima, Jakarta:Yayasan Bung Karno



- Swasono, Sri Edi, (2003). *Ekspose Ekonomikka Globalisme dan Kompetensi Sarjana Ekonomi*, Yogyakarta : Pusat Studi Ekonomi Pancasila-UGM
- Swasono, Sri Edi, (2004) Penegasan Bung Hatta dalam Konferensi Ekonomi Pertama (Februari 1946) di Yokyakarta dalam “Merubah Pakem Mewaspadaai Ekonomi Pasar Bebas, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya
- Todaro, M., & Smith, S.,(2009).*Economic Development*, 10th ed, Boston: Addison Wesley
- Pidato Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI Penerbit Oesaha  
Penerbitan Goentoer Yogyakarta cetakan ke 2, 1949.